



PEMERINTAH KABUPATEN  
BOJONEGORO

# LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI

TAHUN 2018

# KATA PENGANTAR

---

Pemerintahan transparans dan akuntabel menjadi pondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini. Pemerintah dituntut untuk berkomitmen penuh terhadap transparansi di semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hadir menjawab tantangan tersebut dengan mengusung pilar pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip Transparansi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan mengedepankan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif dan inovatif demi melahirkan kebijakan publik yang berkualitas. Sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro. Dalam perjalanannya, PPID Kabupaten Bojonegoro selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap akses informasi publik. Salah satunya dengan membuka Desk Layanan Informasi pada PPID Corner.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2018, maka PPID Kabupaten Bojonegoro menyusun Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Untuk itu sangat diharapkan saran dan masukan sehingga Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro dapat ditingkatkan.

Semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat positif kepada jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya dan masyarakat pada umumnya

Bojonegoro, 31 Desember 2018  
Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kabupaten Bojonegoro  
Ketua

KUSNANDAKA TJATUR P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670224 198602 1 001

Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik PPID Bojonegoro.....	vi
BAB 1 Bojonegoro, Selayang Pandang.....	1
BAB 2 PPID Kabupaten Bojonegoro.....	4
1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	6
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten dan SKPD.....	7
BAB 3 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	9
1. Sarana dan Prasarana.....	13
2. Anggaran PPID.....	20
3. Daftar Informasi Publik.....	21
4. Permohonan Informasi Publik.....	22
5. Sengketa Informasi Publik.....	33
BAB 4 Hambatan dan Cara Mengatasinya.....	34
1. Hambatan.....	35
2. Cara Mengatasi.....	38
BAB 5 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	39
BAB 6 Dokumentasi.....	41

Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro.....	7
Gambar 2 Desk Layanan PPID Kabupaten Bojonegoro.....	14
Gambar 3 Desk Layanan PPID SKPD.....	15
Gambar 4 Desk Layanan PPID Sambang Desa.....	16
Gambar 5 SIAP LAPOR.....	18
Gambar 6 Publikasi Layanan Informasi.....	19
Gambar 7 Layanan Informasi DIP Pada Web PPID.....	21
Gambar 8 Layanan Informasi DIP Pada Web PPID SKPD.....	21
Gambar 9 Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR!1708.....	27
Gambar 10 Laju Tindak Lanjut Permohonan Informasi Melalui LAPOR!1708.....	28
Gambar 11 Topik Tindak Lanjut Permohonan Informasi Melalui LAPOR!1708.....	29
Gambar 12 Grafik Permohonan Informasi Melalui Radio Malowopati.....	31
Gambar 13 Grafik Permohonan Informasi Melalui Sambang Desa.....	32

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data PPID Kabupaten, SKPD dan BUMD.....	8
Tabel 2 Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk.....	22
Tabel 3 Rincian Pelayanan Informasi pada Desk Layanan Permohonan Informasi.....	23
Tabel 4 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi.....	33

## Gambaran Umum Layanan Informasi Publik Kabupaten Bojonegoro

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan transparansi informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Transparansi informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui transparansi bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui transparansi informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah membentuk PPID. Pembentukan PPID di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pj. Bupati Bojonegoro Nomor 188/154/KEP/412.013/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain melalui SMS Radio Malowopati FM, Forum Konsultasi Publik, Sistem SIAP LAPOR!, maupun Media Sosial yang dikelola oleh PPID.

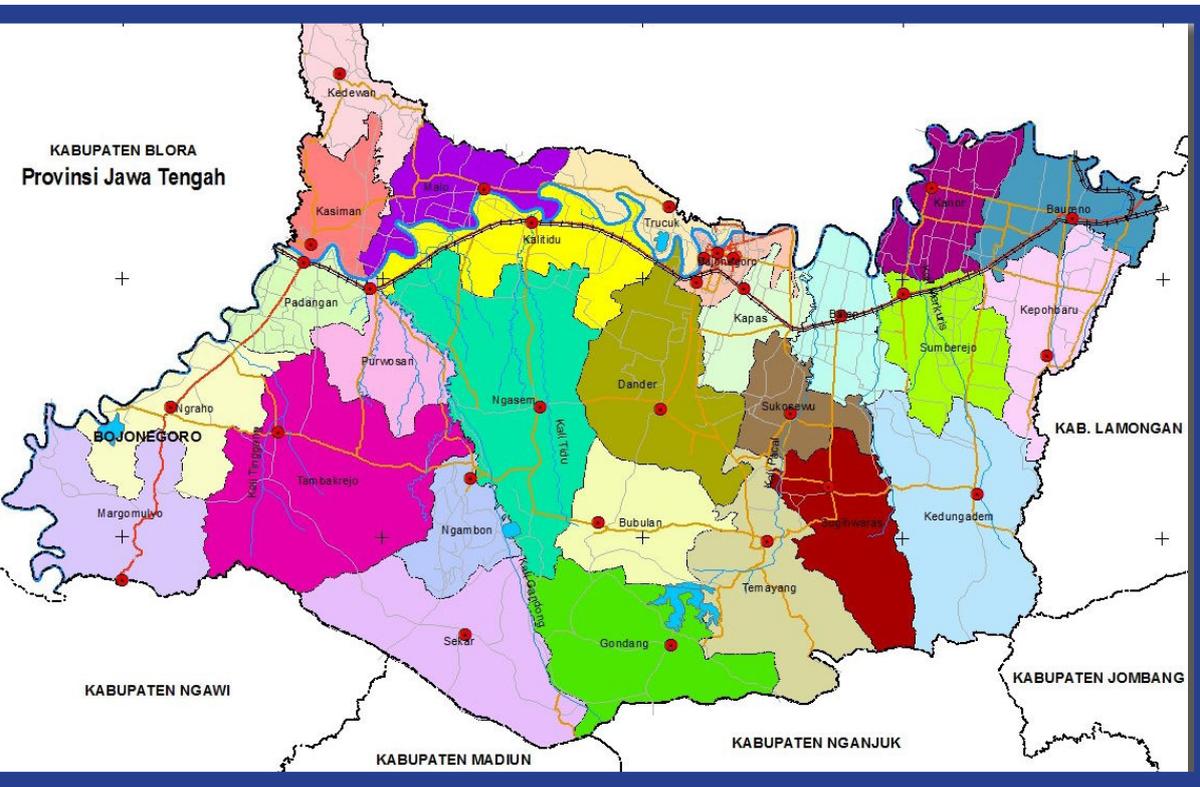




# BAB 1

# BOJONEGORO

# SELAYANG PANDANG



## BOJONEGORO, SELAYANG PANDANG

**B**ojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya dari sisi budaya merupakan percampuran antara budaya jawa-solo-yogyakarta, jawa-majapahit. Untuk itulah kawasan sekitar Bojonegoro disebut juga sebagai daerah Mataram-an.

- Luas wilayah : 235.000 Ha (40,15% wilayah ~ hutan Negara, 32,58% lahan sawah, 22,42% adalah tanah kering dan sisanya 4,85% adalah perkebunan dan lain-lain) Terdiri dari 28 Kecamatan, 419 Desa 11 Kelurahan.
- Jumlah penduduk: 1.308.211 jiwa, 644.303 jiwa berkecimpung di sektor pertanian.
- Kaya Sumber daya alam (Hutan, pertanian dan Migas)
- Tantangan Kab. Bojonegoro:
  - Banjir dan kekeringan
  - Tanah Gerak ~ Infrastruktur dan Jalan rentan rusak
  - Memiliki sejarah panjang dalam kemiskinan (Endemic Poverty)
- Gambaran Birokrasi: 24 Dinas, 6 Badan, Setwan, Inspektorat, 11 Bagian , 3 RSUD, 28 Kecamatan.

Orang yang terlahir di Bojonegoro, dapat dikatakan sebagai orang miskin, tantangan begitu banyak. Namun dalam 1 (Satu) Tahun terakhir sudah mulai nampak adanya perubahan. Berbagai perubahan yang terjadi, tidak terlepas dari adanya industri migas. Terkait industri migas, hanya akan menjadi “kutukan alam”, manakala tidak tepat dalam mengelolanya. Dalam penyusunan anggaran, disaat DBH migas mengalami kenaikan, maka kebijakannya DAU terdapat penurunan penerimaan. Namun manakala DBH migas mengalami penurunan, ternyata tidak ada penyesuaian terhadap penerimaan DAU.



Mengacu pada kondisi, implementasi PPID merupakan kebutuhan dan keharusan, maka strategi pemerintahan transparan dan akuntabel merupakan pilihan bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Transparansi kepada rakyat, secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk berpikir logis terhadap berbagai prioritas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan inilah bagian implementasi revolusi mental.

# BAB 2



# PPID KABUPATEN BOJONEGORO

# PPID KABUPATEN BOJONEGORO

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di Kabupaten Bojonegoro secara hukum berdasarkan Surat Keputusan Pj. Bupati Bojonegoro Nomor 188/154/KEP/412.013/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018.

Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan transparansi informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang transparan merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

## 1. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Transparansi informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai komitmen yang kuat terhadap Transparansi Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa transparansi merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai dengan Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Transparansi Informasi Publik, yaitu:

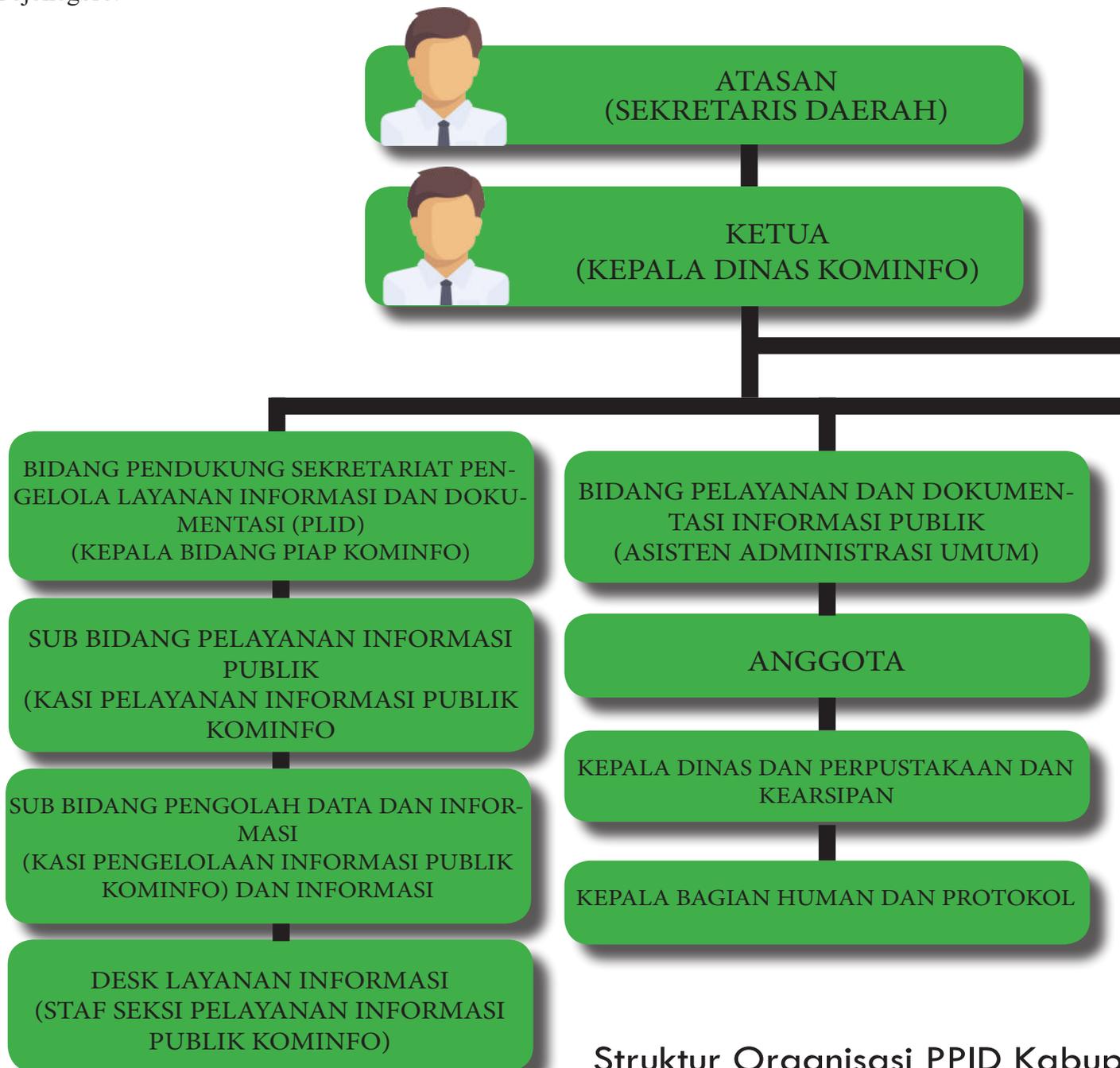


1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Informasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro;
4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (TKBP3);
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro;
8. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/397/KEP/412.11/2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (TKBP3) Daerah;
9. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/234/KEP/412.11/2016 tentang Tim Transparansi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro Periode 2015–2018;
10. Keputusan Pj. Bupati Bojonegoro Nomor: 188/154/KEP/ 412.013/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;
11. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/037/412.45/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro;
12. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/038/412.45/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi Melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Integrasi Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR, SMS Radio Malowopati, Twitter Bupati dan Media Cetak Serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro;
13. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/068/412.45/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

**2. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Seksi Pelayanan Informasi Publik. Penjabaran teknis pengelolaan PPID Kabupaten dan SKPD tertuang dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Untuk PPID Kabupaten menangani informasi dan dokumentasi Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah), Asisten Sekretaris Daerah dan bagian lingkup Sekretariat Daerah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID SKPD.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.



Struktur Organisasi PPID Kabup

Data PPID Kabupaten dan PPID SKPD serta BUMD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah terbentuk PPID, sebagai berikut:

Tabel 1  
Data PPID Kabupaten, SKPD dan BUMD

NO	URAIAN	JUMLAH PPID	JUMLAH PERSONIL PPID SKPD	KETERANGAN
1	PPID Utama	1	17	
2	SKPD			
	a. Badan	6	42	
	b. Dinas	24	168	
	c. Inspektorat	1	7	
	d. Sekretariat DPRD	1	7	
	e. Kecamatan	28	196	
	f. RSUD	3	21	
	g. BMUD	5	35	
	JUMLAH	69	493	

Organisasi PPID SKPD, diketuai oleh Sekretaris untuk lingkup Badan, Dinas, Inspektorat dan Kecamatan, untuk Sekretariat DPRD oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diketuai oleh Ka.Bag Program, Hukum, dan Hubungan Masyarakat. Masing-masing atasan langsung dari PPID adalah para Kepala SKPD. Struktur organisasi PPID Kabupaten maupun SKPD meliputi Pembina PPID, Ketua PPID, Sekretaris, Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.



# PPID Corner

KAB. BOJONEGORO

BOJONEGORO  
OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

GLOBAL CONCERN  
AND LOCAL PROTOTYPE  
BY CO CREATION FOUR ELEMENT  
TROUGHT - OGP



**GOAL**  
SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
TO CREATE  
WELL BEING FOR ALL

PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

## BAB 3

# PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



DR. Hj. Anna Mu'awanah  
Bupati Bojonegoro

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Drs. H. Budi Irawanto, M.pd**  
Wakil Bupati Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan aksesibilitas informasi melalui berbagai media, yaitu melalui Twitter, Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube, Layanan Pengaduan Online, SMS langsung, SMS Radio Malowopati FM, Forum Radio, serta Forum Konsultasi Publik. Disamping itu juga dilakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada di Kabupaten Bojonegoro.





Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut:

## **1. Sarana dan Prasarana**

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Dalam Upaya memenuhi kebutuhan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dilakukan penyediaan informasi yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro di Gedung Pemkab Bojonegoro jalan P. Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro.

Perubahan mendasar dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik yang melayani kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat adalah kegiatan dialog publik yang sebelumnya dilakukan di Pendopo telah diubah kemasannya dimana jajaran pemerintah juga hadir dan datang ke masyarakat dalam kegiatan yang dikemas dengan tajuk “SAMBANG DESA”. Disamping itu evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah juga dilakukan langsung di desa yang memerlukan penanganan secara sinergi antar SKPD ,rapat-rapat tersebut dilakukan dibalai desa bahkan pada objek permasalahan yang disampaikan masyarakat.

## I. DESK PPID STATIS

### a. Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten

Layanan PPID Kabupaten Bojonegoro menyatu dengan Gedung Baru Pemkab Bojonegoro dimana Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bojonegoro berada di lantai 3, Layanan PPID Corner berada di lantai 1 depan pintu masuk sebelah Utara Gedung Pemkab Bojonegoro. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Ruangan desk layanan informasi PPID Kabupaten berukuran 5 x 5 meter, dilengkapi dengan set ruang tamu, desk pelayanan informasi, 1 buah Personal Computer terkoneksi internet, almari dan rak buku, booklet, leaflet, buku-buku seputar PPID, papan struktur organisasi, alur permohonan informasi, alur keberatan, poster-poster jam layanan dan jenis layanan, 1 (Satu) orang petugas desk layanan informasi dan formulir-formulir hard copy dan digital 1 unit Televisi untuk menampilkan kegiatan-kegiatan PPID dan transparansi juga informasi infografis lain tentang bojonegoro.



Ruang PPID Corner terdapat pula sarana diskusi untuk para pihak, disamping itu juga diberikan sarana free wifi untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT. Di sisi lain pemohon informasi lebih mudah mengakses informasi karena didukung oleh sarana yang lebih baik dan jarak yang lebih dekat dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro.

Untuk menunjang administrasi pelayanan informasi publik pada Desk Layanan Informasi, tersedia Formulir untuk transaksi pada layanan informasi yang terdiri dari Formulir permintaan informasi publik, Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, Tanda bukti penyerahan informasi publik, Formulir pemberitahuan tertulis, dan Formulir pengajuan keberatan.

**b. Desk Layanan Informasi PPID SKPD**

Desk layanan informasi PPID SKPD berada pada masing-masing SKPD dengan sarana prasaran penunjang hampir sama dengan sarana prasaran yang ada di PPID Kabupaten. Antara PPID Kabupaten dan PPID SKPD telah terkoneksi dengan jaringan IT dan tersinergi dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID serta beralamat di masing-masing badan SKPD yang terkoneksi dengan PPID Utama melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID.



**c. Desk Informasi Pada Mall Pelayanan Publik**



Desk Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Hadir di Mall Pelayanan Publik Bersama Berbagai Pelayanan Publik Lainnya

Mall Pelayanan Publik didirikan sebagai upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman Tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat secara terintegrasi antar layanan, serta terjadi sinergitas antar pelayanan yang ada. Bersama 30 instansi pelayanan baik instansi pusat di daerah maupun layanan OPD yang terdiri dari 199 layanan, dengan rincian: Instansi lingkup Pemkab Bojonegoro, terdiri dari 18 instansi, dengan jumlah pelayanan sebanyak 149, Instansi Pemerintah Pusat di Kabupaten Bojonegoro, terdiri dari 4 instansi, dengan jumlah layanan sebanyak 16, Perbankan, terdiri dari 3 bank, dengan jumlah layanan sebanyak 8 layanan; BPJS, terdiri dari 2 unit, dengan jumlah layanan sebanyak 13, PT Pos Indonesia, dengan jumlah layanan sebanyak 3, PLN, dengan jumlah layanan sebanyak 5, Dan PDAM Bojonegoro, dengan jumlah layanan sebanyak

**d. Desk Informasi Pada Gedung Pusat Informasi Publik**

Pada gedung pusat informasi publik disediakan sarana layanan bagi para komunitas untuk memanfaatkan data layanan yang dipublish melalui display informasi dan data ,disamping itu juga dapat dipergunakan para jurnalis untuk berinteraksi dengan media center yang juga terdapat di gedung tersebut. Guna mempublikasikan berbagai informasi ,radio Malowopati FM menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada gedung pusat informasi publik ,pada gdeung tersebut juga terintegrasi dengan layanan display comand center.



## II. DESK PPID DINAMIS

### a. Desk Layanan Informasi Sambang Desa Jandom Bupati



Desk Layanan Informasi Forum Konsultasi Publik merupakan layanan desk informasi PPID Utama dan SKPD yang melekat pada kegiatan Dialog Publik. Bulan Januari sampai awal Maret 2018, pelaksanaan Dialog Publik bertempat di Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro setiap Hari Jum'at Pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Dengan pertimbangan bahwa Pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus mendekati Masyarakat, maka dari awal bulan Maret sampai Desember 2018 Dialog Publik dilaksanakan di Kecamatan dalam kegiatan Sambang Desa Jandom Bupati. Pada kegiatan ini para pemohon informasi permohonannya dicatat dan ditanggapi langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, Ketua PPID Utama dan PPID SKPD.



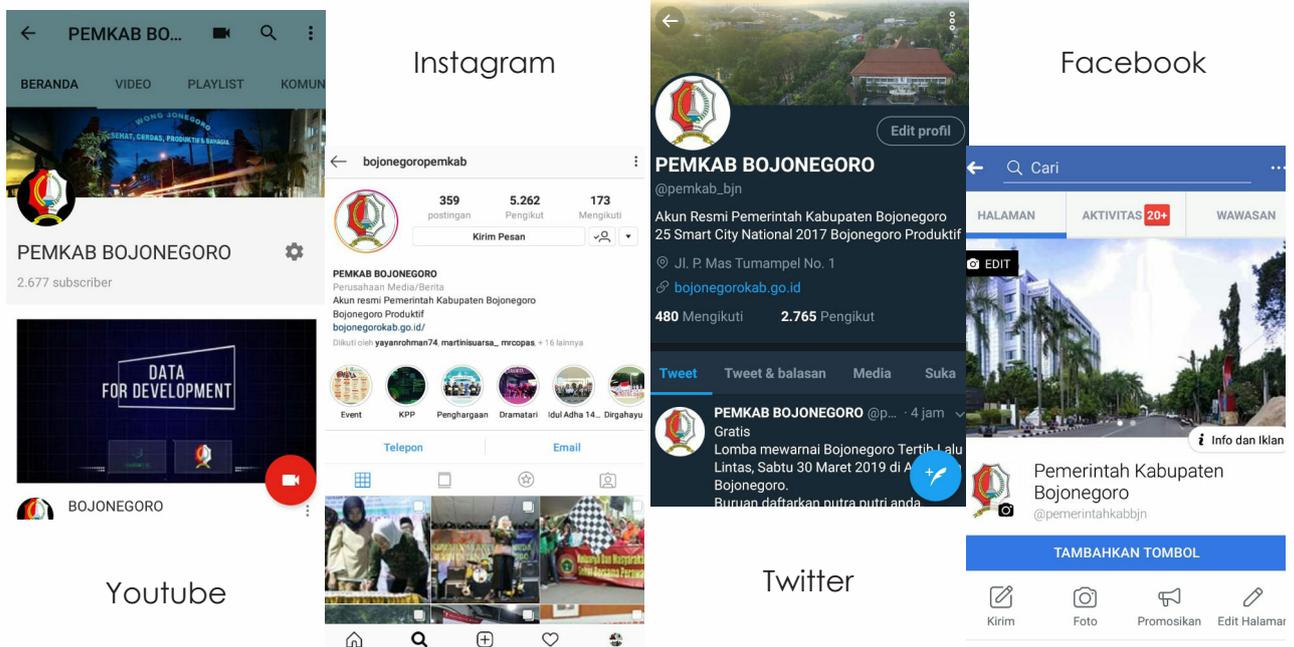
Apabila dalam pelayanan desk mobile ini tidak terselesaikan tuntas, permohonan informasi masyarakat dapat terlayani dalam sistem SIAP LAPOR sehingga relatif tidak ada permohonan yang tidak terlayani.

**b. Desk Layanan Informasi Melalui Car Free Day**



Desk Layanan Informasi lainnya yang baru dikembangkan di akhir tahun 2018 adalah layanan pada Event Car Free Day yang dilaksanakan setiap hari Minggu di awal bulan. Event Car Free Day ini selain sebagai sarana penyampaian program dari Pemerintah kepada masyarakat juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada masyarakat ,Event CFD dengan membuka pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

**c. Desk Layanan Informasi Melalui Media Sosial**



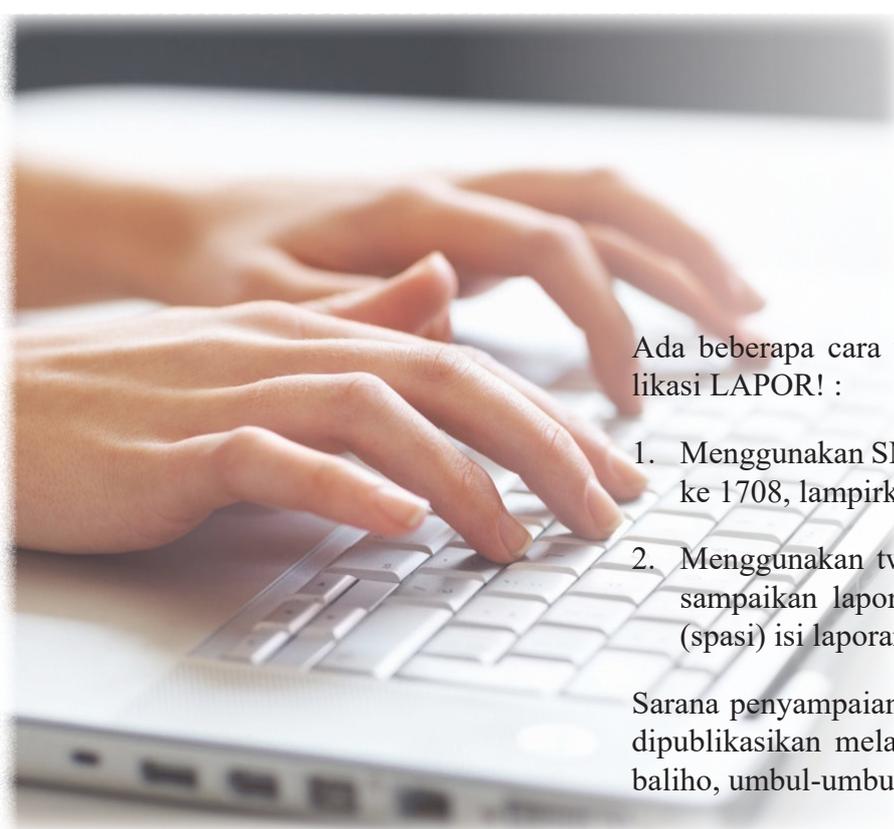
Dengan berkembangnya media sosial pada saat ini menuntut Pemerintah untuk mengelola media sosial sebagai sarana penyampaian informasi sekaligus layanan informasi. Akhir Tahun 2018 Pemkab Bojonegoro mengelola 4 media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu:Youtube,Instagram,Twitter,dan Facebook. Layanan informasi melalui web Bojonegorokab.go.id pada tahun 2018 mendapatkan penghargaan Anugrah Media Humas (AMH) kategori pelayanan informasi melalui internet terbaik 2.

**d. Desk Layanan Melalui Aplikasi LAPOR 1708**

PPID Kabupaten Bojonegoro telah mengembangkan layanan informasi melalui website, baik pada website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (<http://www.bojonegorokab.go.id>) dengan sub domain seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Khusus untuk informasi layanan PPID pada Website PPID Utama <http://ppid.bojonegorokab.go.id/>.

Pada tahun 2015, aplikasi LAPOR! telah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sarana akses penyampaian informasi yang telah ada dan berkembang di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun

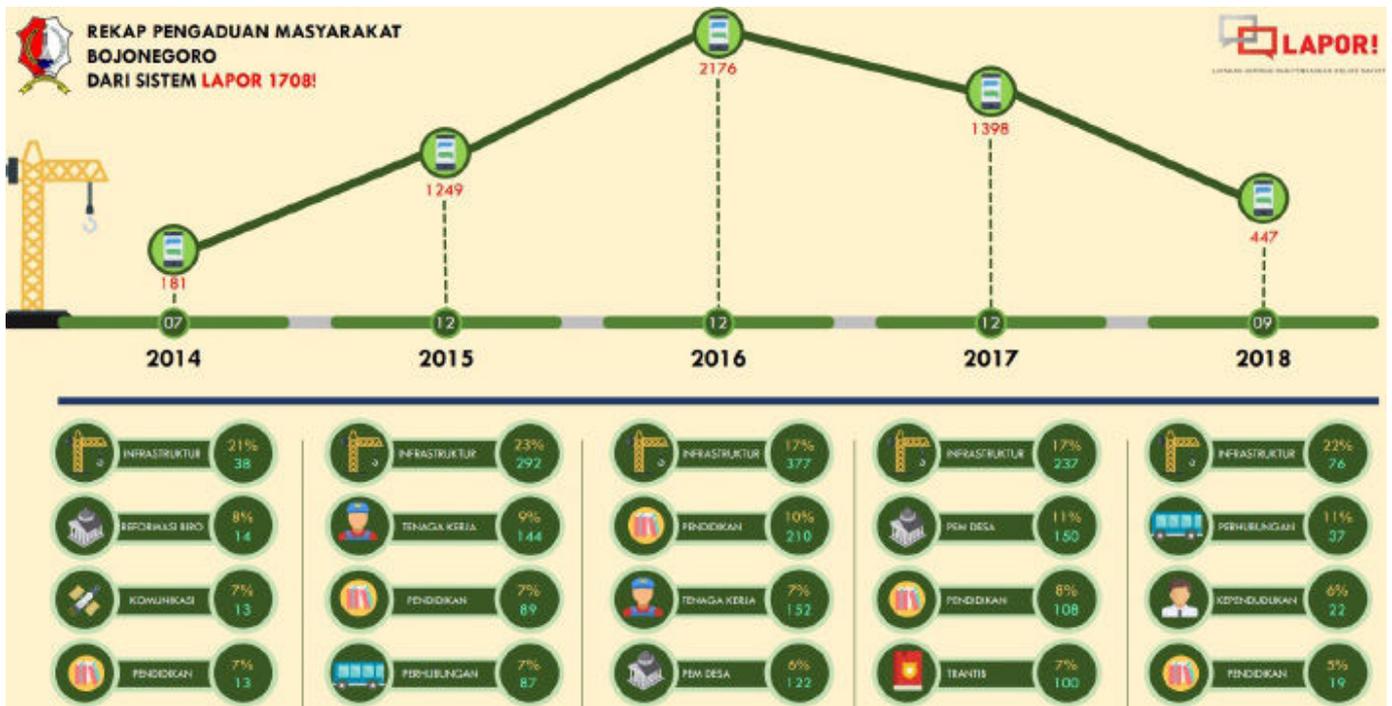
2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik. Semua pengaduan yang berbasis non IT, diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi LAPOR! yakni Sistem Integrasi Aspirasi Publik - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR).



Ada beberapa cara untuk penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR! :

1. Menggunakan SMS: ketik BBN (spasi) isi laporan, kirim SMS ke 1708, lampirkan data dukung (foto, dan lain-lain)
2. Menggunakan twitter: login via twitter di [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), sampaikan laporan di twitter dengan format #LAPORBJN (spasi) isi laporan, mention @pemkab.bjn

Sarana penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR! telah dipublikasikan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, baliho, umbul-umbul, banner dan lain-lain.



**e. Desk Layanan Informasi Melalui Radio Malowopati FM**



Pada Radio Malowopati FM acara Cakrawala Pagi (Ayo Mas Bro=Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif



INDONESIA

Hal-hal yang diintegrasikan adalah semua pengaduan pada WhatsApp Pimpinan SKPD, pengaduan pada Radio Malowopati FM nomor Hp. 08113322958, pengaduan Facebook, Pengaduan Instagram, pengaduan melalui Twitter, pengaduan melalui group WhatsApp: Bojonegoro Produktif dan Bojonegoro Energik. Di samping itu juga berjejaring dengan seluruh radio di Bojonegoro dalam wadah Forum Radio Bojonegoro (FRB) dan komunitas lainnya. Semua pengaduan dari masyarakat melalui berbagai saluran informasi, diolah dan diidentifikasi dan dijadikan input dalam perencanaan sekaligus dipilah dan dijadikan ide dalam pembangunan. Salah satunya adalah ide pembangunan jalan.

## 2. Anggaran PPID

Anggaran pelayanan informasi dan kegiatan PPID Kabupaten setiap tahunnya telah dianggarkan, penganggaran Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 sebesar Rp. 245.980.000,- dan setelah Perubahan APBD sebesar Rp. 95.680.000,- sebagai berikut:



1. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
  - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 149.500.000,- setelah PAPBD sebesar Rp. 63.900.000,-
2. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
  - Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, se besar 61.160.000,- setelah PAPBD sebesar Rp. 960.000,-
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi sebesar Rp. 35.320.000,- setelah PAPBD sebesar Rp. 30.820.000,- Untuk PPID SKPD, penganggarnya diikutkan di Sekretariat masing-masing SKPD yakni pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.



**Yayan Rohman AP, MM.**  
**Pj. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro**

### 3. Daftar Informasi Publik (DIP)



[Beranda](#)
[Profil](#)
[Layanan Informasi](#)
[Informasi Publik](#)
[Laporan PPID](#)
[Transparansi](#)
[Galeri](#)
[Kontak](#)

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK BOJONEGORO

Home > Daftar Informasi Publik Bojonegoro

Show 10 entries

Search:

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Secara Berkala	Setiap Saat	Serta Serta	Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan	Download
A. Profil Kabupaten Bojonegoro											
1	Sejarah Kabupaten Bojonegoro	Berisi tentang sejarah dan latar belakang berdirinya Kabupaten Bojonegoro	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	<a href="#">Lihat/Download</a>
2	Makna Lambang Kabupaten Bojonegoro	Berisi tentang arti dari bentuk, warna dan gambar yang terdapat pada lambang pemerintah kabupaten Bojonegoro	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	<a href="#">Lihat/Download</a>
3	Visi Misi Kabupaten Bojonegoro	Berisi Visi dan Misi kepemimpinan masa jabatan Bupati dan wakil Bupati	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	<a href="#">Lihat/Download</a>
4	Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	Berisi tentang gambaran umum letak geografis atau posisi Kabupaten Bojonegoro, Kondisi iklim Kabupaten	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	<a href="#">Lihat/Download</a>

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro PPID Kabupaten maupun PPID SKPD/Pembantu telah melakukan pemuktahiran data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di website masing-masing Badan Publik. Sampai dengan akhir Tahun 2018 DIP yang sudah diupload PPID Kabupaten sejumlah 180 informasi Publik.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PEREMINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Home Profil Berita Agenda Gallery PPID

### Informasi Publik

Daftar Informasi Publik BAPPEDA xix : Kabupaten Bojonegoro

No.	Kode	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Secara Berkala	Setiap Saat	Serta Serta	Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan	Download
1	Bapped a.01	Kedudukan domisil dan alamat lengkap	Kedudukan domisil dan alamat lengkap Bappeda Kabupaten Bojonegoro ( terdiri dari : Alamat, Nomor Fax(Tlp. dan E-mail )	Sekretaris	BAPPEDA	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	<a href="#">Download</a>
2	Bapped a.02	Visi dan Misi	Berisi tentang Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	BAPPEDA	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	<a href="#">Download</a>
3	Bapped a.03	Tupoksi	Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	BAPPEDA	hardcopy dan website	V				5 tahun	<a href="#">Download</a>
4	Bapped a.04	Struktur Organisasi	Berisi Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	BAPPEDA	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	<a href="#">Download</a>
5	Bapped a.05	Gambaran umum satuan kerja	Berisi gambaran umum tentang Bappeda berdasarkan tugas dan fungsi serta kedudukan dalam Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.	Sekretaris	BAPPEDA	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	<a href="#">Download</a>
6	Bapped	Profil singkat	Berisi tentang gambaran umum secara singkat pejabat-pejabat struktural di Bappeda yang beris	Sekretaris	BAPPEDA	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	<a href="#">Download</a>

DIP BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro

## 4. Permohonan Informasi Publik

Pada Tahun 2018 ini, informasi yang paling banyak dimohon melalui saluran layanan informasi desk PPID dan juga melalui saluran layanan SMS Radio Malowopati serta layanan online adalah mengenai pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk saluran layanan desk informasi mobile (dialog publik) adalah seputar Infrastruktur dan pemerintahan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik tahun 2018 sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Pelayanan (hari)	Dikabulkan		Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Penuh	Sebagian		Dikecualikan	Belum Di kuasai	Lain nya
1	3	1	3	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	8	3	8	0	0	0	0	0
4	4	1	4	0	0	0	0	0
5	4	7	4	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4	3	4	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2	2	2	0	0	0	0	0
10	1	1	1	0	0	0	0	0
11	4	+10	4	0	0	0	0	0
12	1	1	1	0	0	0	0	0
<b>JML</b>	<b>31</b>		<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 2  
Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk  
Tahun 2018

Berdasarkan table 2 diatas menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi berjumlah 31 (tiga puluh satu) , dikabulkan 30 orang dan 1 orang masih dalam proses. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan informasi dan dokumentasi di Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten Bojonegoro dapat terlayani seluruhnya.

30 ORANG



= **DIKABULKAN**

1 ORANG  = **PROSES**

Secara rinci permohonan informasi melalui desk layanan permohonan informasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Rincian Pelayanan Informasi pada Desk Layanan Permohonan Informasi

NO REGISTER	PEMOHON	ISI PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
1	2	3	4	5
001/I/PPID/BJN/2018	Agung Putu Iskandar	1. Buku Dialog 2. Statistik Lapo 1708 3. Foto Dialog Publik	Penulisan Booklet	Terpenuhi
002/I/PPID/BJN/2018	ElismaHerdina Wati	Fakta integritas lap. Realisasi dana desa Pejambon Kec Sumberrejo dan Ds. Wonocolo Kec. Kedewan	Skripsi	Terpenuhi
003/I/PPID/BJN/2018	Elisma Herdinawati	Indeks Kesulitan Geografis Setiap Desa	Skripsi	Terpenuhi
004A/III/PPID/BJN/2018	Aco. Ardiansyah Andi Patingari	1.Perda APBD dan rincian tahun 2017 dan 2018 2.Perda APBD dan rincian tahun 2017 dan 2018	1.Menjadi bahan kajian 2.Memperoleh pengetahuan dalam pengelolaan APBD Pemerintah Terbuka (Open Government)	Terpenuhi
004B/III/PPID/BJN/2018	Elisma Herdinawati	Doc Pengelolaan desa, Khususnya desa pejambon	Data untuk Skripsi	Terpenuhi
005/III/PPID/BJN/2018	Ahmad Irgi Riza Artandi	Daftar hadir peserta dialog publik bulan Okt 2017-Des 2017	Skripsi	Terpenuhi
006/III/PPID/BJN/2018	Berliantya Sotyaning Arum	Rekapitulasi Data Dialog Publik Jumat th 2018	Tesis	Terpenuhi
007/III/PPID/BJN/2018	Muhartono	Realisasi Penggunaan Anggaran DP, APD dan PAD th 2016-2017	Studi banding	Terpenuhi
008/III/PPID/BJN/2018	Heri Sulistiyono	Realisasi Penggunaan Anggaran Ds Jamberejo kec. Kedungadem	Studi Banding	Terpenuhi

1	2	3	4	5
009/III/PPID/BJN/2018	Nurul Badriyah	1. SOP LAPOR! 2. Payung Hukum LAPOR! 3. SK Outsourcing	Study Banding	Terpenuhi
010/III/PPID/BJN/2018	Rosidha	IKM 2015,2016,2017, inovasi dan teknologi Pembkab Bojonegoro	Penelitian Skripsi	Terpenuhi
011/IV/PPID/BJN/2018	Riska Yuli Irdiana	Sop PPID/Pelayanan	Panduan pembuatan Sop Pelayanan	Terpenuhi
012/IV/PPID/BJN/2018	Bahagia Nastiti	-Laporan Tahunan PPID TH 2017 <u>-Data_OGP</u> -Data SKM 2016-2017	Penelitian Skripsi	Terpenuhi
013/IV/PPID/BJN/2018	Nurika Prahesti	SK PPID, TPID	Sebagai Studi Tiru PPID KAB Malang	Terpenuhi
014/IV/PPID/BJN/2018	Moch Ade Rahman Putra	-Rekap Dialog Publik - Jumlah aduan lapor - karakteristik lokasi dan wilayah	Penelitian skripsi	Terpenuhi
015/V/PPID/BJN/2018	Muhartono	Dokumen kontrak pengerjaan jembatan Trucuk antara Dinas PU dgn Bulag	Studi Banding Pemberdayaan	Dalam Proses, karena Proyek masih dalam pengerjaan
016/V/PPID/BJN/2018	Andi Hariyanto	Smart City, PPID, dll	Study Tiru	Terpenuhi
017/VII/PPID/BJN/2018	Suliyanto	Data E-gov, PPID dan KIM	Studi Tiru	Terpenuhi
018/VII/PPID/BJN/2018	Ayu Rizki Amalia	Bojonegoro Dalam Angka 2014, 2016, 2017, screenshot aduan jalan/lapor	Penelitian	Terpenuhi
017 a/V/PPID/BJN/2018	Firda Tri Widyarakhma	1. Perbup tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Tupoksi Dinas Kominfo 3. Peraturan KIP di Kabupaten Bojonegoro 4. Contoh aduan LAPOR!	Observasi memenuhi tugas mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia	Terpenuhi

1	2	3	4	5
017 B/V/PPID/BJN/2018	Gunaidik	1. RAPBDes 2016-2017 Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo 2. SPJ dan Realisasi APBDes 2016-2017 Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo 3. Berita Acara Lelang Bondo Deso dan Bengkok 2016 dan 2017 Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP 2. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 3. PMK No. 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa	Terpenuhi
019/VII/PPID/BJN/2018	Bastiani Tjokronegoro	Salinan Informasi Akte Kelahiran	Pembuatan akte kelahiran dan pengurusan BPJS tenaga kerja	Terpenuhi
020/VII/PPID/BJN/2018	Ariyanti Suyoto	Persyaratan dokumentasi pengajuan IMB	Untuk permohonan perubahan IMB	Terpenuhi
021/IX/PPID/BJN/2018	Mohammad Joko Utomo	1. Perda No 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Indikator Keterbukaan Informasi Pemerintah Desa 3. Renaksi Tahun 2018 s.d 2020	Penelitian	Terpenuhi
022/IX/PPID/BJN/2018	Ghea Ardy P.	SOP Pelayanan Informasi, pengaduan dan peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik	Survey awal SKM	Terpenuhi
023/X/PPID/BJN/2018	Dwi Muji Hardiyanto	Pengaduan Penipuan	pengaduan penipuan	Terpenuhi
024/XI/PPID/BJN/2018	Sigit Pramono	Analisa Jabatan dan Analisa Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro	Sebagai salah satu acuan penyusunan analisa jabatan	Terpenuhi

1	2	3	4	5
025/XI/PPID/BJN/2018	IDFos Indonesia	Ringkasan APBD dan Penjabarannya: 1. Tahun 2013 s.d 2017 berupa APBD Murni, perubahan dan APBD Realisasi. 2. Tahun 2018 APBD Murni dan perubahan. 3. RPJMD Tahun 2013 s.d 2018	Penelitian	Terpenuhi
026/XI/PPID/BJN/2018	Ida Martiningrum	Kelengkapan Administrasi PPID	Bahan referensi	Terpenuhi
027/XI/PPID/BJN/2018	LSM Link Kontrol	Data Bantuan Keuangan Desa (BKD) dari APBD Tahun 2018 yang diterimakan di Desa-desa Se Kabupaten Bojonegoro	Study Banding layak tidaknya atas Bantuan tersebut	Proses
030/XII/PPID/BJN/2018	Anik Mustika Rahayu	Background praktek KIP di Bojonegoro	Skripsi	Terpenuhi

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa pemohon informasi melalui desk layanan informasi dari 31 pemohon informasi pada tahun 2018, yang berasal dari NGO di gunakan untuk pengkayaan data dan bahan diskusi, pemohon informasi berasal dari perseorangan/individu dokumen yang dimohon kebanyakan digunakan untuk bahan pembelajaran, karya ilmiah, dan penelitian.



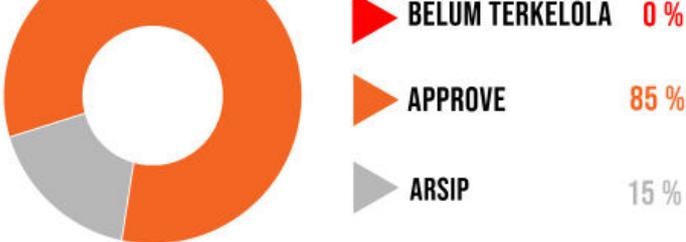
Terkait dengan aduan dan permohonan informasi melalui aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Tahun 2018 sebanyak 478 aduan dan permohonan. Permohonan tersebut semuanya dikabulkan atau ditindak lanjuti oleh SKPD yang membidangi, sebagaimana data statistik dari aplikasi LAPOR!1708 sebagai berikut:



Layanan Permohonan Informasi  
Melalui LAPOR!1708

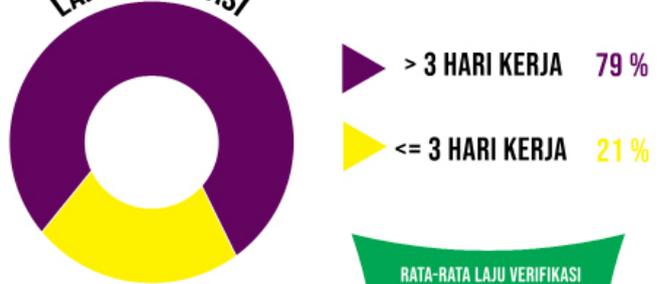
Rata-rata laju tindak lanjut terhadap berbagai permohonan informasi dari Admin Kabupaten ke SKPD adalah 6 jam kerja, sedangkan tindak lanjut dari SKPD rata-rata adalah 4,37 hari kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan. Implementasi sistem aplikasi ini dipergunakan untuk evaluasi SKPD terhadap kecepatan respon publik.

**PENGELOLAAN LAPORAN**



JUMLAH LAPORAN  
**6,344**

**LAJU VERIFIKASI**



RATA-RATA LAJU VERIFIKASI  
**-15.58**

**STATUS LAPORAN**



JUMLAH LAPORAN  
**3,011**

**LAJU TINDAK LANJUT**



RATA-RATA LAJU TINDAK LANJUT  
**4.37 HARI**

Laju Tindak Lanjut Permohonan Informasi Melalui LAPOR!1708

Topik Layanan informasi melalui LAPOR!1708 di tahun 2018 ini meliputi: Infrastruktur 12%, Reformasi birokrasi 6%, Pendidikan 5%, Perhubungan 6% sedangkan sisanya 71% adalah topik lainnya dan topik terkait kesehatan, Pemerintahan Desa, Administrasi Kependudukan, Lingkungan hidup, kesra, pertanian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lain-lain.

Topik Permohonan Informasi dan SKPD Terlapor Melalui LAPOR!1708



JUMLAH LAPORAN

**4,793**



Permohonan informasi melalui Radio Malowopati FM pada tahun 2018 sebanyak 633 permohonan informasi, yang semuanya telah diberikan jawaban dan ditindaklanjuti secara penuh. Untuk memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat, telah dikembangkan acara Ayo Mas Bro (Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif) mulai pukul 08.00-09.30, dimana secara bergiliran Kepala SKPD menyampaikan program dan informasi yang dikelola oleh SKPD secara on-air kepada masyarakat. Masyarakat Bojonegoro/pendengar radio Malowopati diberikan keleluasaan untuk mengajukan permohonan informasi terhadap SKPD yang menjadi narasumber, dengan menghubungi SMS/WA : 08113322958.

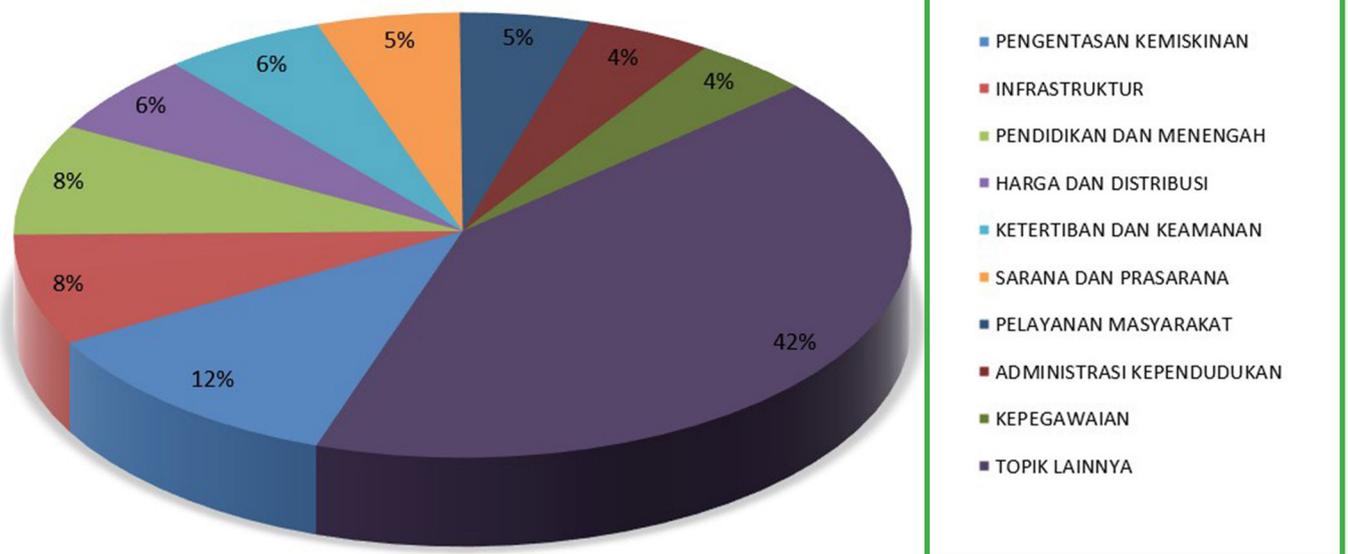
Operator/penyiar di Radio Malowopati sebanyak 8 (delapan) orang menjaring laporan dari masyarakat melalui program Unit Reaksi Ce-

pat pengelolaan aduan dengan cara komunikasi melalui Whatsapp, SMS, dan telepon. Jam siar radio malowopati mulai jam 06:00 s/d 24:00 WIB dengan rata-rata menerima 10-20 aduan masuk tiap harinya.





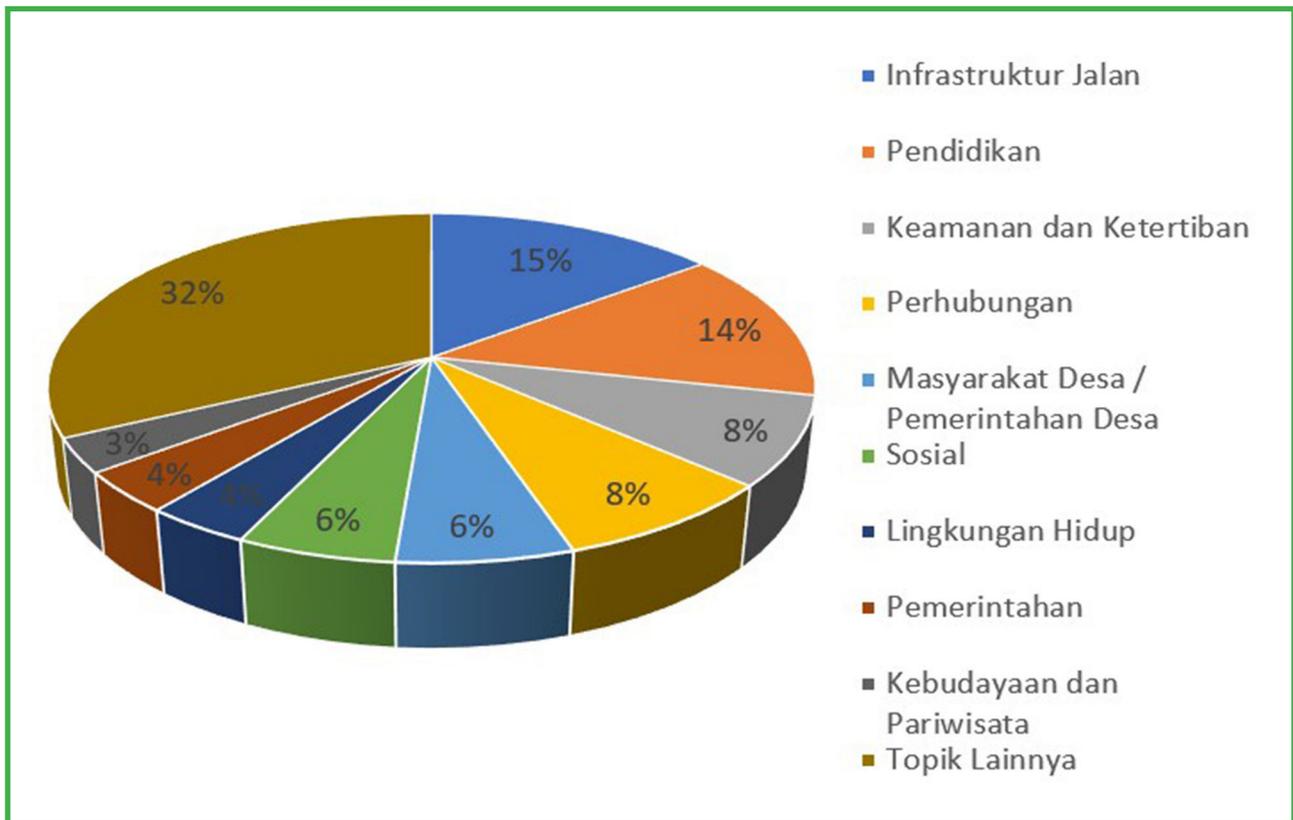
Topik layanan informasi melalui Radio Malowopati laporan Unit Reaksi Cepat (URC) 10 kategori yang paling banyak dimohon adalah tentang: Pengentasan Kemiskinan 12%, Infrastruktur 8%, Pendidikan 8%, Harga dan Distribusi 6%, Ketertiban dan Keamanan 6%, Sarana dan Prasarana 5%, Pelayanan Masyarakat 5%, Administrasi Kependudukan 4%, Kepegawaian 4%, dan 42% untuk topik lainnya.



Grafik Permohonan Informasi  
Melalui Radio Malowopati (URC)

Desk layanan informasi melalui Forum Konsultasi Publik, pada tahun 2018 sebanyak 158 permohonan informasi yang semuanya telah dijawab dan ditindaklanjuti.

Topik layanan informasi pada Forum Konsultasi Publik tahun 2018 adalah Infrastruktur jalan 15%, Pendidikan 14%, Keamanan dan Ketertiban 8%, Perhubungan 8%, Masyarakat Desa/Pemerintahan Desa 6%, Sosial 6%, Lingkungan Hidup 4%, Pemerintahan 4%, Kebudayaan dan Pariwisata 3%, Lainnya 32% meliputi sektor Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komunikasi dan Informatika, Penerangan, Pertanahan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengairan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pertanian/Perkebunan, Perdagangan, Koperasi dan usaha mikro dan Ketah-



Grafik Permohonan Informasi Melalui Forum Konsultasi Publik (Sambang Desa)

Berbagai aduan/permohonan informasi melalui berbagai akses informasi yang telah diintegrasikan dengan aplikasi SIAP LAPOR, telah ditindaklanjuti dalam perencanaan anggaran pada musrenbank tahun 2019. Hal ini dengan kata lain ,bahwa pengelolaan keterbukaan informasi publik diKabupaten Bojonegoro tidak hanya sekedar melayani permohonan informasi namun sudah menjadi bagian isu strategis yang harus mendapatkan solusi dari masing-masing SKPD yang dituangkan dalam RAPBD.

## 5. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2018 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permohonan informasi kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Tabel 4  
Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudan		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





# BAB 4

# HAMBATAN

# DAN CARA

# MENGATASINYA

## 1. HAMBATAN



Dalam pelayanan informasi publik ditemukan beberapa hambatan, kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan transparansi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi. Berikut ini beberapa kendala-kendala dalam penerapan transparansi informasi publik antara lain:

## a. Faktor Internal

- Sumber Daya Manusia (SDM). Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan umum serta khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat diperlukan oleh personel yang menangani pengelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kondisi yang ada saat ini adanya keterbatasan personel menjadi masalah yang dihadapi;
- Masih ada beberapa PPID SKPD/Pembantu yang belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID;
- Belum semua Pejabat/aparat memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan;
- Adanya mutasi pegawai sehingga program PPID terputus dan tidak berkelanjutan;
- Belum tersedianya sistem pengarsipan yang memadai baik itu pengarsipan data dalam bentuk hardcopy maupun data dalam bentuk file digital (softcopy);



Bendungan Gerak  
KALITIDU BOJONEGORO

## b. Faktor Eksternal

- Kondisi Publik. Peran publik menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan;
- Belum adanya regulasi yang mengatur tentang kewajiban pemohon informasi untuk melampirkan Term Of Reference (TOR);
- Adanya pemohon informasi yang tidak memberikan umpan balik setelah menerima informasi
- Masih adanya pemahaman dari para pihak bahwa permohonan informasi tidak dimanfaatkan sesuai tujuan permohonannya, disamping itu jumlah permohonan yang diajukan melebihi kapasitas kompetensi pemohon terkait dengan tujuan permohonannya. Untuk itu perlu dikuatkan dengan regulasi yang mengikat dan mengatur penggunaan informasi yang dimohon .



## **2. CARA MENGATASINYA**



Pada dasarnya pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak mengalami kendala yang berarti. Hal yang agak mempengaruhi proses pelayanan informasi publik adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik itu dalam segi kuantitas maupun kualitas. Selama ini personil yang melayani informasi terbatas. Bila dihadapkan dengan dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi maka dirasakan perlu peningkatan kualitas pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tentang ke-PPIDan. Saat ini kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personil lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlangsung terus-menerus mengingat beban kerja yang semakin meningkat di masing-masing bidang. Disamping itu, perlu ditingkatkan pula digitalisasi data secara menyeluruh, regulasi yang lebih mengikat dan pemahaman kepada masyarakat tentang PPID baik hak maupun kewajibannya.

# BAB 5 PENUTUP





PPID Utama Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik pada tahun-tahun yang akan datang. Berikut ini rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan:

1. Meningkatkan kualitas Desk Layanan Informasi Publik untuk permohonan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, serta laporan tahunan melalui rakor dan bimbingan teknis PPID yang dilaksanakan tahun 2019, serta dijadikan target capaian pada rencana strategis Dinas Kominfo tahun 2018-2023;
2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Mendorong adanya tanggungjawab dalam memenuhi dokumen publik di setiap satuan kerja;
4. Tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik;
5. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi;
6. Mentoring SDM dan pemisahan petugas layanan (front desk) dan pengelola informasi (operator), sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal;





## DOKUMENTASI PPID BOJONEGORO

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai Instansi percontohan dalam penerapan Aplikasi SP4N-LAPOR! Versi 3.0 dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Sebagai Instansi-Percontohan dalam Penerapan Aplikasi SP4N-LAPOR! Versi 3.0. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secepat mungkin melakukan penyesuaian dari sisi SDM kepada semua pengelola LAPOR! di tingkat SKPD, BUMD dan lembaga lainnya yang terkait. Tindak lanjut tersebut adalah pelaksanaan bimbingan teknis penerapan LAPOR! Versi 3.0 yang digelar di partnership room Gedung Pemkab Bojonegoro lantai 4 pada hari Rabu, 18 April 2018.

<http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/398>



MONITORING DAN PEMANTAUAN PENERAPAN  
APLIKASI SP4N-LAPOR!

---



Selain mengadakan Bimtek, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga rutin mengadakan monitoring dan evaluasi penerapan Aplikasi SP4N-LAPOR! ke SKPD.

## PENGHARGAAN !!!

**P**elaksanaan layanan informasi publik di tahun 2018 PPID Kabupaten Bojonegoro yang dalam ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika bersama instansi terkait telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Beberapa kegiatan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

1. Juara 2 LCCK KIM Jawa Timur oleh KIM Mangun Jaya, Desa Kandangan, Kecamatan Trucuk Bojonegoro dalam Pekan KIM Jawa Timur X Tahun 2018 (mendapatkan penghargaan);
2. TOP 10 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2018;
3. TOP 25 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2018;
4. Juara 1 tingkat Nasional Kategori Layanan Informasi dan Transparansi Publik oleh Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo;
5. Juara 2 Kategori Pelayanan Informasi melalui Website dalam Anugerah Media Humas (AHM);
6. Kategori Desa Terbuka Kategori “A” untuk Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2018;
7. Kategori Meja Layanan Informatif dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2018;
8. PPID Terbaik ke II Kab/Kota Kategori “A” (Sangat Terbuka) dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2018;
9. TOP IT Implementation on Regency Government 2018 dalam TOP IT & TOP TELCO Award 2018;
10. TOP Leadership 2018 dalam TOP IT & TOP TELCO Award 2018;
11. Juara 2 Kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (Website) Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Anugerah Media Humas 2018.

## PENGHARGAAN TOP IT & TOP TELCO AWARDS 2018



### TOP IT & TOP TELCO Awards 2018

- <https://kumparan.com/beritabojonegoro/bojonegoro-raih-penghargaan-top-it-award-2018-1544152686921545651>
- <https://www.ucnews.id/news/Bojonegoro-Raih-Top-IT-Award-2018/465640809272873.html>
- <https://www.kanalbojonegoro.com/bojonegoro-raih-top-it-award-2018/>



# PPID AWARD 2018



- <https://www.kabarjawatimur.com/ppid-award-2018-kabupaten-bojonegoro-terima-beberapa-penghargaan/>
- <http://www.harnasnews.com/kabupaten-bojonegoro-raih-penghargaan-komisi-informasi-jawa-timur.html>
- <https://beritabojonegoro.com/read/16286-bojonegoro-raih-penghargaan-ppid-award-dari-komisi-informasi-jatim.html>
- <https://www.kanalbojonegoro.com/ppid-bojonegoro-raih-predikat-sangat-terbuka-di-ppid-awards-jatim/>



Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih penghargaan Anggakara Birawa Top 10 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2018.

- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-umumkan-top-10-institusi-pengelola-pengaduan-pelayanan-publik-terbaik>
- <https://jpp.go.id/nasional/pemerintahan/327213-panrb-serahkan-penghargaan-top-10-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-publik-2018>
- <https://beritabojonegoro.com/read/16044-bojonegoro-raih-penghargaan-top-10-pengelola-pengaduan-pelayanan-publik-2018.html>
- <https://kumparan.com/suarabanyuurip/layanan-pengaduan-online-bojonegoro-raih-penghargaan-nasional-1541775337123614677>
- <https://rakyatindependen.co.id/pemkab-bojonegoro-raih-penghargaan-top-10-pengelola-pengaduan-pelayanan-publik-nasional-2018/>



Hak Anda Untuk Tahu!

## ANUGERAH MEDIA HUMAS 2018



Pemkab Bojonegoro kembali raih Juara II dalam kategori Pelayanan Informasi melalui Website dalam Anugerah Media Humas (AMH) pada gelaran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) 2018 (14/12). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro Kusnandaka Tjatur P di Ballroom Hotel Novotel Kota Tangerang Banten.

Acara ini adalah gelaran yang ke 13 sejak tahun 2006 yang mana acara ini sebagai bentuk apresiasi kepada K/L/D BUMD Perguruan Tinggi fokus pada aktivitas kehumasan. Khusus kategori Pelayanan Informasi melalui Website merupakan kategori yang paling bergengsi, karena diikuti kurang lebih 210 kabu-

paten/kota. Selain itu, ada beberapa kategori yang dilombakan diantaranya, Festival Pertunjukan Rakyat, Stan Pameran, Penerbita Media Internal, Media Sosial, Siaran Pers.

### DAFTAR PEMENANG AMH 2018

#### Kategori Penerbitan Media Internal

K/L/BUMN/BUMD/PTN:

1. Kementerian PUPR
2. Kemenkeu
3. Universitas Indonesia

Nominator: Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, BSSN

Pemerintah Daerah:

1. Provinsi DKI Jakarta
2. Kota Surabaya
3. Provinsi Jawa Timur

Nominator: Kota Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Cilacap



### Kategori Siaran Pers/Pemberitaan

K/L/BUMN/BUMD/PTN:

1. Kementerian Pariwisata
2. Kementerian PANRB
3. Kementerian PUPR

Nominator: Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Otoritas Jasa Keuangan

Pemerintah Daerah:

1. Provinsi Jawa Barat
2. Kabupaten Padang Pariaman
3. Kabupaten Kudus

Nominator: Provinsi Jawa Timur, Kota Bandung, Kota Bogor

### Kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet

K/L/BUMN/BUMD/PTN:

1. Kementerian Keuangan
2. Universitas Padjajaran
3. Komisi Yudisial

Nominator: Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah Daerah:

1. Kota Tangerang
2. **Kabupaten Bojonegoro**
3. Kota Bandung

Nominator: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bogor

### Kategori Media Sosial

K/L/BUMN/BUMD/PTN:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Bank Indonesia
3. Institut Teknologi Bandung

Nominator: Kementerian Keuangan, Universitas Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah Daerah:

1. Kota Bandung
2. Kota Bekasi
3. Kota Tangerang

Nominator: Kota Bogor, Provinsi Kalimantan Utara

### Stan Pameran Terbaik

1. Terbaik: Kementerian Sekretariat Negara
2. Pelayanan Terbaik: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dekorasi Terbaik: Kementerian Perhubungan
4. Terinovatif: BMKG
5. TerFavorit: Kementerian Pariwisata

Festival Media Tradisional Pertunjukkan Rakyat Tingkat Nasional 2018

Sutradara Terbaik: Dadan Ramdani, Provinsi Jawa Barat

Pemeran Wanita Terbaik: Sri Rahayuningsih, Provinsi Jawa Tengah

Pemeran Pria Terbaik: Suherman, Sulawesi Barat

Penampilan Terbaik:

1. Jawa Barat
2. Sumatra Barat
3. Sumatra Utara

Juara Umum AMH 2018: KEMENTERIAN KEUANGAN

- <https://kumparan.com/beritabojonegoro/bojonegoro-raih-juara-ii-pelayanan-informasi-melalui-website-dalam-amh-2018-1543979165653564783>
- <https://damarkita.com/2018/12/05/situs-bojonegoro-juara-ii-nasional/>
- <https://rakyatindependen.co.id/kabupaten-bojonegoro-berhasil-raih-juara-ii-pelayanan-informasi-melalui-website/>

# PENGUATAN PPID KABUPATEN BOJONEGORO

**D**inas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten \_\_Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Transparansi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se Kabupaten Bojonegoro, Selasa (27/11/2018) bertempat di ruang Angling Dharmo Pemkab Bojonegoro. Acara ini dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Yayan Rohman, AP., MM dan dihadiri oleh seluruh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi masing-masing SKPD, dengan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Ketty Tri Setyorini.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar setiap SKPD mampu memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan transparan seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang PIAP (Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik) Sigit Jatmiko, S.STP. “Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan bidang PIAP setiap tahun. Dimana kegiatan ini bertujuan untuk mengupdate perkembangan informasi dan transparansi pemerintah”, terangnya. Meskipun banyak informasi yang diupgrade di website dan media yang lain, namun belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Selain melayani permohonan informasi PPID Kab. Bojonegoro juga melayani pengaduan masyarakat, karena pengaduan masyarakat juga merupakan informasi yang harus dikelola.

Sementara itu dalam sambutannya, Pj. Sekeretaris Daerah, Yayan Rohman, AP, MM menyampaikan, kebutuhan masyarakat dulu dan sekarang sudah beda mengenai keterbukaan dan transparansi daerah, karena masyarakat sekarang sudah semakin kritis akan informasi. Kebutuhan informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang sebagai sarana pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus terlayani dengan baik oleh penyelenggara negara. Informasi publik yang transparan merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.



Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi dan informasi membuat pola-pola interaksi antara pemerintah dan rakyat juga telah berubah. Interaksi rakyat bisa dilakukan tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Rakyat bisa menyampaikan input, bisa menyampaikan kritik, bisa menyampaikan keluhan-keluhan terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi, bisa call centre, sms, e-mail, twitter, facebook, instagram dan masih banyak lagi.



PPID selain harus mampu memberikan informasi yang transparan juga harus melayani keberatan dari masyarakat atas informasi yang telah disampaikan. Keberatan ini harus diketahui oleh masyarakat yaitu dengan cara menyampaikannya ke meja informasi (Desk PPID) yang akan diteruskan kepada atasan PPID. Setelah itu atasan PPID akan menganalisa keberatan tersebut dan hasilnya harus disampaikan paling lambat 30 hari kerja.



Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Ketty Tri Setyorini dalam paparannya menyampaikan, pasal 22 Undang-undang KIP menjelaskan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur Permohonan Informasi Publik. Secara umum gambaran alur permohonan informasi dimulai dari Pemohon mendatangi petugas Desk PPID. Setelah itu PPID dalam waktu maksimal 10+7 Hari menanggapi permohonan informasi tersebut. Jika pemohon puas maka pelayanan informasi selesai. Namun jika pemohon tidak puas maka dapat mengajukan keberatan tidak puas ke Desk PPID yang akan diproses tanggapan maksimal 30 hari oleh atasan PPID. Jika tanggapan terhadap keberatan memuaskan pemohon maka layanan selesai tuntas. Namun kembali lagi, jika pemohon ternyata masih tidak puas maka pemohon dalam kurun waktu maksimal 14 hari dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. (Nuty)

- <http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/468>
- <https://www.timesindonesia.co.id/read/191110/20181127/211523/ppid-bojonegoro-skpd-wajib-melakukan-transparansi-informasi/>
- <https://www.indoshinju.com/?p=12307>
- <https://beritabojonegoro.com/read/16179-pemkab-bojonegoro-gelar-rapat-koordinasi-penguatan-transparansi-ppid.html>
- <https://kumparan.com/beritabojonegoro/pemkab-bojonegoro-gelar-rapat-koordinasi-penguatan-transparansi-ppid-1543310980436776837>

## IMPLEMENTASI LAYANAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA

FGD Implementasi Layanan Informasi dan Transparansi  
Pemerintah Desa



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mengadakan Forum Grup Diskusi (FGD) di Creative Room lantai 6 Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (14/12). FGD ini dilakukan untuk percepatan implementasi layanan informasi dan Transparansi Pemerintahan Desa di 28 kecamatan se-kabupaten Bojonegoro. Sebagai Narasumber adalah Kasi Pemberdayaan Dinas PMD Bojonegoro Agus Raharjo, Jurnalis Tempo Sujatmiko dan Kepala Desa Pejambon Abdul Rohman.

<https://sedahkidul.desa.id/kominfo-bojonegoro-suntik-28-tpid-terbaik/>

## TOP 8 Implementasi Layanan Informasi dan Transparansi Pemerintah Desa



Delapan desa di Kabupaten Bojonegoro dinobatkan sebagai Top 8 Implementasi Layanan Informasi dan Transparansi Pemerintah Desa (Pemdes) se-Kabupaten Bojonegoro, yang diselenggarakan Dinas Kominfo setempat di Co Creating Room Lt. 2 Gedung Pemkab, Senin (17/12). Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut terhadap inventarisasi Desa Informatif dan Transparan yang dilakukan terhadap 28 Desa sebagai wakil dari masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil penilaian tim evaluator yang terdiri dari Sigit Jatmiko dari Dinas Kominfo, Ahmad Suharto dari Dinas PMD dan Jatmiko dari Jurnalis Tempo, terpilih Top 8 Desa Informatif dan Transparan dengan urutan sebagai berikut:

1. Desa Kauman Kec. Bojonegoro
2. Desa Tlogorejo Kec Kepohbaru
3. Desa Deru Kec Semberejo
4. Desa Kandangan Kec Trucuk
5. Desa Mojodeso Kec Kapas
6. Desa Banjaran Kec Baureno
7. Desa Kacangan Kec Tambakrejo
8. Desa Blimbinggede Kec Ngraho



<http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3582/Ini--Top-8-Desa-Terbaik-Layanan-Informasi-dan-Transparansi-Pemdes-se-Bojonegoro>

<https://damarkita.com/melek-transparansi-ala-delapan-top-desa-bojonegoro/>

# **FORUM KONSULTASI PUBLIK**



## **FORUM KONSULTASI PUBLIK *DESA DOLOKGEDE***

Dialog Publik di Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo, 21 Agustus 2018

- <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3298/Pemkab-Bojonegoro-Gelar-Dialog-Publik-Di-Desa-Dolokgede>
- <http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/dialog-publik-bersama-warga-di-desakelahiran-mensesneg>
- <https://kumparan.com/beritabojonegoro/pemkab-bojonegoro-gelar-dialog-publik-di-desa-dolokgede-tambakrejo-1534823616615312500>

## FORUM KONSULTASI PUBLIK *DESA PEJAMBON*

Jandom Bareng di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo, 25 Agustus 2018

- <https://www.kanalbojonegoro.com/pemkab-gelar-dialog-publik-dalam-jandom-bareng-des-pejambon/>



## FORUM KONSULTASI PUBLIK DESA SUKOHARJO

Sambang Desa dan Jandom Bupati di Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu, 19 Desember 2019.

- <https://www.youtube.com/watch?v=VAdMqARCb-mY>
- <http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/478>



# DESK LAYANAN INFORMASI PPID

---

---



**DESK LAYANAN INFORMASI RADIO  
MALOWOPATI FM**



P  
R  
O  
G  
R  
A  
M  
  
A  
Y  
O  
  
M  
A  
S  
  
B  
R  
O

# MEDIA SOSIAL



Hari Rabu, 4 Oktober 2018 bertempat di Ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Tim Medsos dari Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro dan Tim Medsos Bupati dalam mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk mempublikasikan transparansi informasi publik melalui media sosial (medsos).

Alamat Medsos Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah:

NO.	MEDIA SOSIAL (MEDSOS)	PEMKAB	DINKOMINFO
1.	Website	<a href="http://www.bojonegorokab.go.id">www.bojonegorokab.go.id</a>	<a href="http://www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id">www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id</a>
2.	Facebook	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Kominfo Bojonegoro
3.	Instagram	bojonegoropemkab	dinkominfo_bjn
4.	Twitter	@pemkab_bjn	@DinasKominfoBjn
5.	Youtube	PEMKAB BOJONEGORO	KOMINFO BOJONEGORO

# STUDY TIRU

## DAFTAR KUNJUNGAN KERJA PADADINASKOMUNIKASIDANINFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

NO	TANGGAL	INSTANSI/ SKPD/ MITRA PRO- FESI	KABUPATEN/ KOTA	PIMPINAN	FOKUS KUNJUNGAN	JUM- LAH (org)
1	15 Maret 2018	Pemkot War- ingin Timur	Kota Waringin Timur	Asisten 1	Smart City	20
2	27 Maret 2018	DINKOMIN- FO	Kab. Ngawi	Kabid Pen- gelolaan dan Layanan In- formasi Publik	Aplikasi LAPOR!	7
3	28 Maret 2018	DINKOMIN- FO	Kab. Ponorogo	Sekdin Kominfo	Aplikasi LAPOR!	7
4	03 April 2018	Pemkab Mukomuko	Kab. Mukomuko	Bupati	Peran dan Kinerja Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro dalam mendukung Open Government di Lingkup Pemk- ab Bojonegoro	12
5	03 April 2018	Pemkab Pidie Jaya	Kab. Pidie Jaya	Sekda	Pelayanan Publik dan penerapan kanal aduan publik dalam Sistem Pe- merintahan Trans- paran di Kabupat- en Bojonegoro	20
6	12 April 2018	DINKOMIN- FO	Kab. Malang	Kabid Statis- tik dan Infor- masi	Lapor!SP4N, PPID dan aplikasi pen- gaduan masyarakat lainnya	7

NO	TANGGAL	INSTANSI/ SKPD/ MITRA PRO- FESI	KABUPATEN/ KOTA	PIMPINAN	FOKUS KUNJUN- GAN	JUM- LAH (org)
7	12 April 2018	DINKOMIN- FO	Kab. Lumajang		Fokus kunjungan :  1. Kelembagaan dan Manajemen LPPL Radio Malowopati 2. Mekanisme Kerjasama Pemkab dengan Media Massa 3. Implementasi LAPOR SP4N 4. Peran Media Center Pemkab dan optimalisasi ke-mitraan publik 5. Pemanfaatan dan pemeliharaan me-dia luar ruang 6. SOTK Dinas Kominfo	5
8	19 April 2018	DINKOMIN- FO	Kab. Kepulau- an Anambas	Kabid Infor- masi, Komu- nikasi Publik dan Persand- ian	PPID	2
9	26 April 2018	DINKOMIN- FO	Kab. Labuhan Batu	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengelolaan LPPL	5
10	11 Mei 2018	DINKOMIN- FO	Kab. Demak	Kadin Komin- fo	Smart City	35
11	15 Mei 2018	DINKOMIN- FO	Kab. Jember	Sekdin Kominfo	Masterplan Smart City dan LAPOR!SP4N	5

NO	TANGGAL	INSTANSI/ SKPD/ MITRA PRO- FESI	KABUPATEN/ KOTA	PIMPINAN	FOKUS KUN- JUNGAN	JUM- LAH (org)
12	5 Juli 2018	DINKOMIN- FO	Kota Batu	Kabid Statis- tik dan Per- sandian	Form data statis- tik daerah, sistem integrasi e-govern- ment dan penge- lolaan data center, pelaksanaan LPSE dan PPID serta penerapan sert- ifikat elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bojo- negoro	9
13	18 Juli 2018	DINKOMIN- FO	Kab. Ngawi	Kabid Pen- gelolaan dan Layanan In- formasi Publik	Aplikasi LAPOR!	3
14	14 Agustus 2018	Kantor Staf Presiden (KSP)	Jakarta		Pengelolaan pengaduan dan pengembangan sistem pemerintah- an berbasis elek- tronik	6
15	24 Agustus 2018	DINKOMIN- FO	Kab. Tapin		e- Monev, e-LAPOR, dan Info harga	10
16	19 Oktober 2018	Pemkab Ku- lon Progo	Kab. Kulon Progo		Transparansi Infor- masi Publik Desa	6
17	30 Oktober 2018	DINKOMIN- FO	Kab. Sidoarjo	Kadin Komin- fo	LAPOR!SP4N	51
18	22 Nopem- ber 2018	Pemkab Sra- gen	Kab. Sragen	Sekretaris Di- nas Kominfo	Study Komparasi Penerapan E-Mon- ev	13
19	18 Desember 2018	DINKOMIN- FO	Kab. Nganjuk	Kabid Statistik dan Pengelo- laan Informasi Komunikasi Publik	KIM dan LPPL	13

## Kota Waringin Timur



Pemkab Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah berkunjung ke Pemkab Bojonegoro dalam rangka studi tiru terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Smart City untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Rombongan sejumlah 13 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Kominfo Kab. Kotawaringin bersama 3 orang staf, 2 orang dari Sekretariat Daerah, 5 orang Anggota DPRD Komisi IV, dan 2 orang dari Sekretariat DPRD tersebut diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Djoko Lukito, S.Sos, MM di ruang Co Creating Gedung Pemkab Bojonegoro Lantai 2, didampingi oleh Sekretaris Dinas Kominfo bersama jajaran, Kamis 15 Maret 2018.

<http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/387>

## Kab. Ponorogoro

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ponorogoro untuk yang keempat kalinya sejak tahun 2017 lalu, berkunjung ke Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro untuk belajar lebih jauh tentang penerapan aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat). Rombongan yang terdiri dari 8 orang tersebut diterima di Dinas Kominfo Bojonegoro oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik (PIAP), Sigit Jatmiko, S.STP, Rabu 28 Maret 2018. Selama dua hari, 28-29 Maret 2018,



mereka belajar lebih mendalam tentang pengoperasian aplikasi LAPOR SP4N yang dilakukan petugas Admin dan Pejabat Penghubung serta penanganan berbagai kendala dan solusinya lapangan.

<http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/391>

## Kab. Lumajang

Selama 2 hari (12-13 April 2018) Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang study tiru ke Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, mereka m e n g g a l i ,

mempelajari, dan kemudian akan mencoba menerapkannya terkait 6 hal yaitu Kelembagaan dan manajemen Lembaga



Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Malowopati, Mekanisme kerjasama Pemerintah dengan Media Massa, Implementasi LAPOR SP4N, Peran media center Pemerintah Kabupaten dan Optimalisasi Kemitraan Publik, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Media Luar Ruang, dan Struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Kominfo.

<http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/396>

<https://jatim.antaranews.com/berita/253075/kominfo-lumajang-studi-banding-sp4n-lapor-bojonegoro>

## Kab. Demak



Pemkab Demak berkunjung ke Pemkab Bojonegoro, Jum'at 11 Mei 2018 untuk studi banding dan pendalaman tentang penerapan Smart City dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Bojonegoro. Rombongan yang dipimpin oleh Sekda Kab. Demak Dr. Singgih Setyono, M. Kes. diterima di partnership room Gedung Pemkab lantai 4. Jajaran Pemkab Bojonegoro yang hadir adalah Kepala Dinas Kominfo didampingi beberapa Kabid, Kasi, dan staf, Kepala Dinas PMPTSP didampingi beberapa pejabat struktural, Kepala Bapenda didampingi beberapa pejabat struktural, serta dari Dinas PU Bima PR. Pemkab Bojonegoro menjadi rujukan belajar karena sejak tahun 2017 lalu masuk dalam 25 kabupaten/kota yang terpilih pada gelombang pertama program nasional Gerakan Menuju 100 Smart City yang juga telah mendapatkan pendampingan dan melakukan bimtek selama 4 kali di tahun 2017. Terpilihnya Bojonegoro diantaranya karena dinilai berhasil mengembangkan bidang komunikasi dan teknologi dan informasi menuju ke arah Smart City Indonesia.

<http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/404>

## Kab. Pidie Jaya dan Kab. Muko-Muko

Transparansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sangat memberikan efek positif di berbagai bidang pelayanan publik bagi masyarakat Bojonegoro kembali menjadi daya tarik khusus bagi Pemerintah Kabupaten lain di luar pulau Jawa sebagai rujukan studi banding, studi tiru maupun benchmarking dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan selalu mengutamakan peningkatan mutu pelayanan publik. Kali ini sekaligus dua pemerintah kabupaten (Pemkab) yaitu Pemkab Muko Muko Provinsi Bengkulu dan Pemkab Pidie Jaya Provinsi Aceh melakukan lawatan kerja ke Pemkab Bojonegoro. Rombongan tersebut diterima jajaran pejabat Pemkab antara lain Bapenda, Dinas PMD, Bagian Ortala, Bagian Humas dan Protokol, dan Bagian Pemerintahan di creative room Gedung Pemkab Bojonegoro lantai 6, Selasa 3 April 2018.



<http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/393>

## **Kab. Labuhanbatu**

Kamis 26 April 2018, beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara berkunjung ke Dinas Kominfo Bojonegoro untuk belajar lebih jauh tentang teknis pengelolaan dan pelaksanaan LPPL Radio Malowopati FM. Rombongan dari Labuhanbatu yang terdiri dari Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kadin Kominfo, Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik (PIAP), Kasubag Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum, dan Kasi Media Komunikasi Publik tersebut diterima oleh Sekdin Kominfo Bojonegoro di ruang Kepala Dinas Kominfo bersama Kabid PKP, Kabid PIAP dan Ka TU LPPL Radio Malowopati FM.

<http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/400>



## **Kab. Jember**



Dinas Kominfo Kabupaten Jember berkunjung ke Dinas Kominfo Bojonegoro untuk koordinasi dan studi banding terhadap penyusunan Master Plan Smart City dan penerapan LAPOR! SP4N. Rombongan yang terdiri dari Sekdin Kominfo, Kabid Informasi dan Publikasi, Kabid Komunikasi dan Publikasi, Kasi Layanan Komunikasi Publik dan 1 staf tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro beserta Kabid PKP, Kabid Layanan E-Gov, Kabid PIAP dan 1 Kasi di ruang kerjanya Gedung Pemkab Lantai 3, Selasa 15 Mei 2018.

<http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/405>

## ***Kab. Ngawi***



Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi berkunjung ke Bojonegoro untuk studi tiru operasional dan pengelolaan LAPOR! SP4N. Rombongan yang terdiri dari 3 orang tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro beserta Kabid PIAP (Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik) dan 1 Kasi di ruang kerjanya Gedung Pemkab Lantai 3, Rabu 18 Juli 2018. Mereka ingin memperdalam teknis operasional LAPOR! SP4N

<http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/422>

## ***Kab. Kulon Progo***



Dalam rangka perumusan kebijakan daerah, dari Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan studi tiru tentang Transparansi Informasi Publik Desa (KIPD) di Kabupaten Bojonegoro. Rombongan yang terdiri dari 6 orang tersebut diterima di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jum'at, 19 Oktober 2018. Selain Sekretaris, Kabid PIAP Dinas Kominfo, hadir pula Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), H. Moch. Chosim, SH.

<http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/455>

## Kab. Sragen

Hampir 1 tahun yang lalu tepatnya tanggal 27 Nopember 2017, Dinas Kominfo Kabupaten Sragen bersama beberapa SKPD lainnya mengadakan kunjungan pembelajaran ke Dinas Kominfo Bojonegoro, saat itu terkait implementasi open government, one data, e-planning dan e-budgetting. Kesempatan kali ini, Kamis 22 Nopember 2018 Dinas Kominfo Kab. Sragen bersama beberapa pejabat dari BAPPE-DA, BPKAD dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sragen kembali berkunjung ke Dinas Kominfo Bojonegoro terkait penerapan E-Monev (monitoring dan evaluasi). Rombongan berjumlah 13 orang tersebut diterima oleh Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik PIAP (Sigit Jatmiko), Kasi Pengembangan Aplikasi (Panji Ariyo), dan Kasubid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BAPPE-DA (Yudi Darmawan) di Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro.

<http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/467>



## Kab. Sidoarjo

Pemkab Sidoarjo berkunjung ke Dinas Kominfo Bojonegoro, Selasa 30 Oktober 2018 dan diterima di ruang pertemuan lantai 6 gedung Pemkab Bojonegoro. Tidak tanggung-tanggung, tamu dari Pemkab Sidoarjo yang hadir sejumlah sekitar 51 (lima puluh satu) orang yang berasal dari Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, RSUD, Satpol PP, Bappeda, Perpustakaan, BPPD, BPKAD, dan staf dari sembilan kecamatan. Sebagian besar mereka adalah petugas operator pelayanan pengaduan masyarakat yang ingin menggali ilmu, belajar bersama tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat menggunakan aplikasi LAPOR!-SP4N yang telah terkoneksi dengan MenPANRB.

<http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/459>

